

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Peraturan dalam hukum internasional mengenai hak ekonomi dimuat di berbagai konvensi dan perjanjian internasional, baik yang bersifat universal maupun regional. Peraturan internasional bersifat universal yang memuat hak ekonomi antara lain adalah UDHR dalam Pasal 22, 23, 24, dan 25, ICCPR dalam Pasal 1, ICESCR dalam Pasal 6, 7, dan 11, ICERD dalam Pasal 5 poin i. International Labour Organization atau ILO sebagai sebagai badan PBB mengeluarkan beberapa peraturan mengenai hak ekonomi, antara lain adalah Migration for Employment 1949 dan Protection of Migrant Workers (Underdeveloped Countries) 1955. Mengenai peraturan internasional bersifat regional, organisasi internasional regional seperti ASEAN, Liga Arab, dan Uni Afrika belum mengeluarkan banyak produk hukum mengenai hak ekonomi bagi individu tetapi produk hukum mengenai hal ekonomi bagi negara anggotanya dalam hal meningkatkan perekonomian negara anggota organisasi internasional regional. Organisasi internasional regional lainnya seperti NAFTA memberikan kewenangan pada negara anggotanya untuk membuat peraturan hak ekonomi bagi warga negaranya. Uni Eropa memiliki prinsip empat kebebasan yang dimuat dalam The Treaty on the Functioning of the Europe Union yaitu

2. kebebasan pergerakan komoditas perdagangan, kebebasan pergerakan manusia (imigran), pelayanan, dan modal.
3. Pelaksanaan *family separation policy*, yang merupakan bagian dari *zero tolerance policy* milik Pemerintahan Trump yang ditetapkan pada imigran pencari kerja dari Meksiko ke Amerika Serikat tidak sesuai dengan beberapa prinsip utama dalam Convention on the Rights of the Children atau Konvensi tentang Hak Anak Pasal 2, 3, 6, dan 12. Para imigran pencari kerja tidak berdokumen tersebut bermigrasi ke Amerika Serikat untuk memenuhi hak ekonomi mereka yang tidak terpenuhi di Meksiko, negara asal mereka. Selain itu, Amerika Serikat juga melanggar hak bagi anak-anak dari imigran pencari kerja yang tidak berdokumen untuk berkumpul dengan keluarganya dan dipertemukan kembali dengan anggota keluarga yang telah dipisahkan dengan mereka selama lebih dari dua tahun. Menurut peraturan nasional imigrasi Amerika Serikat The Immigration Act of 1907, *family separation policy* juga bertentangan dengan salah satu poin ketentuan tersebut yang melarang anak-anak yang tidak didampingi orang tuanya untuk memasuki wilayah Amerika Serikat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah

1. Bagi Pemerintah Amerika Serikat sebaiknya segera melakukan ratifikasi terhadap KHA 1989 dan menyelesaikan permasalahan imigrasi yang terjadi di

kawasan perbatasan yaitu dengan mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat *family separation policy* dan memberikan suaka pada imigran asal Haiti yang berada di kawasan perbatasan.

2. Bagi Pemerintah Meksiko seharusnya dapat meningkatkan tingkat perekonomian, memperluas lapangan kerja, serta menyediakan fasilitas dasar seperti listrik dan pendidikan gratis di Meksiko agar dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Meksiko sehingga warga negara Meksiko merasa nyaman tinggal di negaranya sendiri dan tidak bermigrasi ke Amerika Serikat dalam jumlah yang besar.

